

Mesianisme Kemanusiaan

Misi Gereja dalam Konteks Sosial Politik Indonesia
oleh Zakaria Ngelow

Orde Baru tumbang setelah Suharto dipaksa turun dari kekuasaannya pada hari Kenaikan Yesus Kristus, tgl 21 Mei 1998. Dan dengan itu Indonesia memasuki babak baru dalam sejarahnya, yakni proses demokrasi yang ditandai dengan pembentukan partai-partai politik. Sementara itu, konflik-konflik yang mulai merebak dalam masyarakat selama beberapa tahun sebelumnya, sebagai bagian dari dinamika itu, justru makin membesar dan meluas. Karangan ini difokuskan pada sikap Gereja-gereja / umat Kristen di Indonesia terhadap dinamika itu, dengan memberi catatan teologis sebagai bingkai panggilan gereja.

Transformasi Mesianisme

Kesaksian Alkitab pada intinya berbicara mengenai Misi Ilahi (*missio Dei*), yang mencapai puncaknya dalam "peristiwa Yesus" (inkarnasi, salib, kebangkitan, kenaikan, pentakosta dan parousia). Substansi misi Ilahi itu adalah karya penciptaan dan penyelamatan-Nya terhadap kehidupan manusia, berhadapan dengan kuasa anti-kehidupan (yang berpuncak pada kematian). Kasih setia Allah dinyatakan dalam kehendak dan tindakan-Nya untuk "merebut kembali" ciptaan-Nya yang jatuh ke dalam dosa, yaitu kuasa kematian. Dan keagungan kuasaNya dinyatakan dalam cara memenangkan pertarungan itu, yakni bukan pada jalan jaya kemahakuasaan melainkan jalan derita penebusan. Sebab itu, Injil Kristus *mentransformasi* mesianisme politik Yudaisme, yang mengharapkan kemenangan kuasa dan kejayaan duniawi dinasti Daud, menjadi suatu mesianisme kemanusiaan. Dasarnya adalah kasih setia yang dinampakkan dalam pengorbanan Sang Mesias di kayu salib dan

perkenan Allah membangkitkan Dia "melampaui" kematian. Paskah Kristus –sebagaimana pengertian aslinya dalam kisah Keluaran dari Mesir– menunjuk pada tindakan Allah membawa umat-Nya keluar "melalui" maut yang melanda Mesir.



"Injil Kristus mentransformasi mesianisme politik ... yang mengharapkan kemenangan kuasa dan kejayaan duniawi ... menjadi suatu mesianisme kemanusiaan."

Transformasi mesianisme juga dilakukan Allah dengan mendirikan gereja-Nya di dalam dunia, baik sebagai penerima maupun sebagai pembawa (penyaksi) kehidupan baru, yang dikaruniakan melalui kematian – dan diteladankan dalam pelayanan– Yesus Kristus. Sebab itu, gereja pertama-tama adalah institusi Ilahi dalam kerangka kelanjutan *missio Dei* terhadap kehidupan umat manusia. Gereja menerima dan sekaligus menyaksikan kehidupan baru dalam Yesus Kristus. Karena itu, panggilan gereja mendapat hakekatnya dalam misi Ilahi dalam Kristus. *Missio ecclesiae Christi* dan sama terjalin dengan *missio Dei*.

Kehidupan baru sebagai substansi dari misi Ilahi dapat dipahami dengan meletakkan kehidupan dan sejarah umat manusia dalam pertarungan dengan kuasa kematian yang dimenangkan Allah, dengan membuka dimensi baru "pengharapan pada kehidupan baru dalam kebangkitan Kristus", dan sekaligus kesaksian nyata mengenai kehidupan baru dalam pengharapan itu. Di sini, terungkap sekaligus dimensi pengharapan dan dimensi kewajiban hidup Kristiani. Dimensi kewajiban hidup Kristiani merupakan bagian tak terpisahkan dari pengharapan karena kehidupan umat manusia tetap menjadi arena pertarungan antara kuasa kehidupan di dalam kemenangan Kristus melawan

kuasa maut di dalam dosa manusia. Kehidupan telah dimenangkan karena Allah membangkitkan Kristus, namun manusia masih harus memilih mengikuti jalan kehidupan atau mengikuti jalan kebinasaan.

Hakekat misi yang diuraikan di atas mengedepankan kehidupan bersama umat manusia sebagai agenda pokok dalam misi gereja. Telah mengenai panggilan sosial gereja yang makin berkembang pada beberapa dekade terakhir, memperlihatkan bahwa ada banyak masalah sosial yang terkait dengan penataan kehidupan bersama, apalagi ketika aspek pluralitas kehidupan umat manusia makin diperumit oleh kemajuan teknologi transportasi, komunikasi dan informasi. Dalam penataan kehidupan bersama itu, aspek-aspek penyelenggaraan ekonomi dan politik bersifat menentukan dengan kata kunci demokrasi. Sebab itu, gereja (dan agama-agama pada umumnya) perlu terlibat secara serius dalam setiap upaya memperjuangkan demokrasi. Harapan dan kenyataan kehidupan baru dalam Kristus perlu dinyatakan sebagai substansi kesaksian Kristen dalam perjuangan mewujudkan keadilan ekonomi dan pengembangan demokrasi politik sebagai dasar-dasar utama dalam membangun kehidupan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Partisipasi Demokrasi

Dalam euforia reformasi, setelah kejatuhan Suharto tahun 1998, sejumlah tokoh Kristen ikut berlomba-lomba mendirikan partai Kristen dan menjadi peserta dalam Pemilu tahun 1999. Hanya ada beberapa yang berhasil memperoleh sedikit kursi di tingkat daerah dan nasional. Dan menjelang Pemilu 2004, lebih banyak lagi yang berusaha mendirikan partai baru ataupun dengan menyempal dari partai induknya. Tetapi hanya Partai Damai Sejahtera (PDS) -suatu partai baru yang dimotori kalangan Kristen fundamental- yang lolos menjadi peserta Pemilu 2004, namun ternyata gagal meraih jumlah suara yang bermakna.

Banyaknya usaha mendirikan partai-partai Kristen mungkin menjadi tanda positif meluasnya kesadaran politik namun sekaligus amat lemahnya kepemimpinan, visi dan solidaritas pemimpin Kristen di Indonesia. Perpecahan dalam "gubuk-gubuk politik Kristen" menuju Pemilu 2004 menelanjangi kelemahan itu. Kecilnya perolehan suara partai-partai Kristen dalam Pemilu 1999 mengungkapkan pula kesadaran warga gereja akan jalan buntu suatu partisipasi politik Kristen yang eksklusif dibanding partisipasi secara inklusif melalui partai-

partai nasionalis. Selanjutnya, dapat dicatat bahwa partisipasi politik Kristen eksklusif itu lebih menekankan pencatatan politik nasional dalam kerangka dikotomi ideologis Pancasila versus Islam, ketimbang Reformasi (demokrasi) versus Orde Baru (otoritarian). Sekalipun PDS gagal, penting mengamati fenomenanya sebagai gebrakan kaum Injili dalam dunia politik praktis Indonesia, suatu kenyataan yang tidak ditemukan pada masa-masa sebelumnya. Retorikanya mengenai rekonsiliasi, reformasi dan transformasi belum begitu jelas, termasuk penekanannya sebagai partai untuk memperjuangkan nasib umat Kristen, sebagaimana dinyatakan dalam latar belakang pendiriannya. Memperjuangkan nasib umat Kristen oleh suatu kekuatan politik bersimbol Kristen, mungkin dianggap logis saja oleh kebanyakan orang, namun partisipasi politik Kristen tidak semestinya berwawasan eksklusif-primordial seperti itu. Gereja diutus ke dalam dunia, bukan di utus untuk kalangan sendiri.

Hal lain yang cukup menonjol dalam euforia demokrasi dan reformasi kita adalah makin banyaknya kalangan pendeta dan pejabat gereja lainnya yang terlibat dalam politik praktis. Entah berapa banyak yang kebagian kursi. Pendeta dalam politik praktis di Indonesia tidaklah baru sama sekali. Ada pendeta dalam jajaran pengurus partai Kristen pada zaman kolonial. Pendiri PARKINDO adalah Pdt. Basoeki Probowinoto, dan Pdt. W.J. Rumambi salah seorang tokoh Kristen dalam Konstituante, untuk menyebut beberapa nama. Demikian juga pada masa Orde Baru. Yang menonjol dewasa ini adalah jumlahnya yang besar, dan kebanyakan pada tingkat bawah (*grass roots*). Mereka umumnya baru mendadak direkrut sebagai calon legislatif, bukan secara profesional memilih bergelut di dalam perjuangan partai sejak lama. Dengan kata lain, mereka sekadar dieksploitasi oleh partai-partai politik demi perolehan suara (yang diharapkan dari warga jemaatnya), dan pada gilirannya sang pendeta akan memanfaatkan posisinya mengeksploitasi warga jemaatnya. Dengan demikian gereja, dijadikan kendaraan politik. Sejumlah lembaga gereja mengantisipasi dengan menetapkan aturan-aturan untuk mencegah praktek seperti itu, walaupun efektifitasnya masih harus diuji di lapangan.

Wacana dan proses demokrasi semestinya disikapi gereja-gereja secara pro-aktif dan berwawasan, dengan memberikan pedoman-pedoman yang jelas kepada setiap warga yang terlibat dalam politik praktis, maupun yang berupaya pada tingkat *high politics*. Dalam kaitan itu, gereja-gereja –pimpinan

dan umat Kristen– perlu secara cermat dan cerdas menanggapi reformasi sebagai tonggak penting dan menentukan dalam proses menuju demokrasi ideal, di mana berbagai pihak berusaha untuk menetapkan arah, sifat dan substansi demokrasi Indonesia. Konstelasi dewasa ini memperlihatkan pertarungan antara kekuatan-kekuatan Orde Baru dengan Reformis. Kelompok Reformis sendiri dapat dibedakan antara yang mengunggulkan Islam sebagai basis ideologi dan yang tetap berpegang pada Pancasila. Tetapi terkait dengan pertarungan pada level politik praktis, yang juga sangat penting adalah dukungan terhadap proses demokrasi melalui pengembangan civil society, berupa pemberdayaan masyarakat di bidang-bidang sosial, ekonomi, politik, dst.

Dunia politik kita selama era Reformasi beberapa tahun terakhir, memperlihatkan betapa kekuasaan menjadi pusat percaturan, di mana “politisi Kristen” terlibat pula di dalamnya. Yang semestinya disumbangkan gereja adalah etika politik Kristen, di mana kekuasaan dijalankan sebagai pelayanan dan sebagai mandat Ilahi, yang karena itu perlu dijalankan dengan tanggung jawab moral dan spiritual. Korupsi sebagai bencana budaya berakar pada faham kekuasaan yang terkait dengan akses ekonomi dalam kerangka keserakahan materialistik. Mamon, bukan Tuhan, telah menjadi dasar dan tujuan kehidupan banyak orang dewasa ini. Civil society dalam demokrasi sebagai proses memerlukan kelas menengah bukan terutama secara ekonomi, melainkan dalam idealisme moral-spiritual yang berakar dalam nilai-nilai agama dan kebudayaan.

Dalam kaitan itu, gereja dapat berperan dalam turut memperkuat kecerdasan rakyat, kesadaran hukum, pemberdayaan ekonomi, serta perluasan wawasan pluralitas agama, etnis, budaya yang terbuka. Keterbukaan adalah suatu prasyarat mutlak. Masa depan tidak bisa lain dari masa depan bersama dan yang diperjuangkan bersama dengan visi dan komitmen yang sama sambil menghargai dan memberi tempat bagi kepelbagaian agama, etnis, dan budaya. Kunci utamanya adalah pendidikan sebagai pembinaan watak: memperhalus nurani, rasa keadilan, penghargaan hak asasi, solidaritas atas seluruh ciptaan dan nilai-nilai kemanusiaan lainnya. Pendidikan berbasis kompetensi yang dicanangkan dewasa ini hanyalah suatu pendekatan pragmatis terhadap keterpurukan sosial-ekonomi menghadapi persaingan global dan masalah-masalah pengangguran dan tenaga kerja, bukan terfokus pada pendidikan sebagai pembebasan.

Gereja dan Konflik Sosial

Proses demokrasi tidaklah berlangsung secara “halus”. Ia suatu dinamika yang menimbulkan gejala-gejala besar ataupun kecil dalam masyarakat. Konflik-konflik sosial yang berlangsung di Indonesia sejak dasawarsa lalu adalah bagian dari kegamangan masyarakat mengupayakan suatu masa depan yang lebih demokratis. Ibarat ibu yang sakit bersalin, bisa berhasil dengan bahagia, bisa pula duka-derita. Latar belakang sejarah dan konstelasi politik Indonesia sejak zaman perjuangan kemerdekaan meninggalkan akar-akar konflik antar-kelompok atau golongan. Belum lagi yang terkait dengan transisi masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang menimbulkan berbagai gejala.

Bagaimanakah gereja-gereja di Indonesia menghadapi kenyataan itu? Pertama-tama dapat dicatat sedikitnya 3 pokok kelalaian gereja:

1. Pelayanan yang terkonsentrasi pada aktivitas ritual (termasuk pembangunan gedung-gedung gereja), primordial-eksklusif, dan tidak mengantisipasi perubahan-perubahan sosial yang serba cepat dan menimbulkan potensi konflik dalam masyarakat.
2. Gereja tidak memantau perubahan-perubahan dalam masyarakat di Kalimantan, Sulawesi Tengah, Halmahera, Maluku atau Papua yang sejak awal memperlihatkan potensi konflik, di samping yang sudah sejak lama ada sebagai warisan sejarah gereja. Demikian pula pada aras nasional dalam kerangka percaturan politik nasional gereja tidak memberi perhatian secara strategis.
3. Gereja sibuk dengan masalah-masalah organisasi, peribadahan dan program-programnya. Aktivitas sosial gereja, yang demikian marak pada masa Orde Baru, memperlihatkan sambutan tak kritis terhadap developmentalisme rezim Suharto itu. Itu ironis kalau membaca hasil-hasil Konferensi Gereja dan Masyarakat (KGM) dan rumusan sidang-sidang gereja lokal maupun nasional, serta prinsip partisipasi positif-kreatif, kritis-realistis (dari KGM 1971) yang berusaha memahami perkembangan masyarakat secara komprehensif.

Selain dikerjakan “bagi kalangan sendiri”, pendekatannya pun top-down dalam kerangka “memberi atau melakukan bagi masyarakat”, bukan “merencanakan dan mengerjakan bersama masyarakat” dan tidak pula melibatkan partisipasi pembiayaan dari masyarakat. Masyarakat (baca: warga gereja) hanya menjadi obyek proyek-proyek Dept Parpem atau Dept Sosek Gereja-gereja dengan



dana yang diperoleh melalui proposal-proposal yang diajukan kepada badan-badan mitra di luar negeri. Pemberdayaan dan pendampingan dalam kerangka kemandirian baru dicanangkan (apa pernah dikerjakan?) pada dekade lalu.

Ketika konflik merebak, para pimpinan gereja-gereja di Indonesia di daerah konflik, tidak siap menangani konflik, baik koordinasi bantuan para korban maupun jaringan informasinya. Konflik bersenjata yang dilakukan di daerah konflik, baik defensif maupun ofensif, memang tidak bisa dinilai secara hitam-putih dalam kerangka kesetiaan terhadap prinsip nir-kekerasan etika Kristen. Wacana tentang Anti-Kekerasan sangat terlambat dicanangkan di tengah-tengah masyarakat Kristen yang umumnya berasal dari suku-suku yang berabad-abad hidup dalam tradisi perang suku. Masyarakat pada umumnya juga tidak mendapat kesempatan belajar menyelesaikan konflik-konflik lokalnya karena cara penanganan keamanan dan ketertiban pada zaman Orde Baru yang super peka terhadap konflik (demi mengamankan kekuasaan dan kepentingan-kepentingan politik-sosial-ekonominya). Di pihak lain, tindakan aparat keamanan menghadapi konflik antar kelompok umat kadang-kadang setengah hati atau bahkan memihak kelompok penyerang memaksa orang untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan dalam membela atau mengamankan diri / komunitasnya.

Bagaimana pun, kenyataan itu juga memperlihatkan kelemahan gereja, baik dalam hal keteladanan dalam menderita maupun dalam hal perjumpaan Injil dengan tradisi pra-Kristen. Kisah-kisah kebangkitan tradisi pra-Kristen dalam konflik-konflik berdarah di sejumlah daerah mengungkapkan betapa dangkal Kekristenan di permukaan kehidupan masyarakat tradisional kita. Karena itu pengembangan pemikiran dan aktivitas teologi dewasa ini perlu memberi perhatian pada pembinaan spiritualitas Kristiani yang tersambung dengan –namun sekaligus mengkritisi secara mendasar– tradisi-tradisi spiritual pra-Kristen masing-masing komunitas.

Crisis Center?

Dalam masa konflik pada beberapa tahun terakhir, dilembagakan dalam gereja-gereja dan pada tingkat nasional suatu pelayanan konflik yang diberi nama asing: Crisis Center. Bagaimana pun lembaga-lembaga ini telah berusaha menjalankan perannya dalam penanganan darurat korban-korban konflik, baik bantuan materil maupun menjadi pusat informasi dan strategi dalam mengatasi dan mencegah konflik yang meluas atau

berkepanjangan. Yang perlu diperhatikan kedepan adalah supaya lembaga seperti ini tidak menjadi wadah baru yang diperlakukan seperti wadah partisipasi dalam pembangunan masa Orde Baru seperti di kemukakan di atas: tidak hidup dari tanggungjawab gereja-gereja di Indonesia (dananya dari seberang), pelayanannya untuk kalangan sendiri, dan dikerjakan dari atas tanpa melibatkan warga di grass roots sebagai subyek. Ada kritik yang ironis dari kalangan pengungsi di suatu daerah kepada pihak yang “melayani” mereka (termasuk aktivis LSM dan badan pemerintah): “Kami dapat super mie, kamu dapat super kijing!”

Peran Crisis Center PGI maupun yang dilembagakan masing-masing gereja akan semakin penting, baik menghadapi perubahan-perubahan sosial lokal dan nasional maupun dalam hubungan dengan konstelasi global. Fungsinya selain penanganan keadaan darurat (bencana sosial maupun bencana alam), perlu pula mencakupi pendampingan pastoral dan hukum, pemberdayaan, penelitian dan informasi. Konflik sosial kita umumnya diakibatkan oleh pergesekan-pergesekan dalam kepentingan politik dan ekonomi, yang kemudian dibingkai atau dimotivasi dengan alasan-alasan keagamaan dan atau kesukuan/kedaerahan.

Penanganan konflik secara mendasar memerlukan pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai faktor dan akar-akar sejarahnya. Karena itu tidak dapat dilakukan secara parsial dan oleh masing-masing kelompok secara terpisah. Dan bukan pula sekadar menyelesaikan kasus-kasus yang muncul melainkanantisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terus berkembang dalam dinamika masyarakat. Jadi, bukan sekadar pemadam api. Penanganan konflik bukan terutama bagaimana mencapai tingkat harmoni yang ideal melainkan mencegah konflik menjadi bencana yang lebih besar lagi. Salah satu syaratnya adalah tingkat kesadaran dan kepemimpinan masyarakat, yang terhubung dengan tingkat pendidikan yang bermutu dan merata, termasuk wawasan kemajemukan yang terbuka dan inklusif. Dan karena kaitan-kaitan serta cakupan fungsi yang demikian luas itu maka crisis center sepatutnya membangun jaringan dan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait, baik dalam aspek usaha pemahaman dan pencegahan konflik maupun sharing informasi secara nasional dan global.

Dr. Zakaria J. Ngelow adalah Ketua STT Intim dan dosen di bidang sejarah gereja dan agama-agama